



Menjaga Ratusan Ribu WNI di Taiwan

Jika konflik bersenjata pecah di Taiwan, maka Selat Taiwan akan menjadi medan perang antara AS dan China. Bagi kedua negara tersebut, Taiwan merupakan wilayah yang tinggi nilainya dari sisi strategis. Bagi China, Taiwan adalah bagian yang terintegrasi dan berkembangnya demokrasi di Taiwan bisa menjadi duri dalam daging. Sementara bagi AS, penguasaan Cina secara mutlak di Taiwan berbahaya bagi rantai suplai global AS dan sekutunya. Apalagi, Taiwan kini menjadi sumber utama semikonduktor bagi industri AS.

Bagi ASEAN, konflik akan terjadi di halaman depan yang tentunya berakibat langsung pada ekonomi ASEAN. Efek perang secara kinetik juga pasti berpengaruh ke keamanan dan stabilitas kawasan. Namun, ada juga masalah yang tak kalah penting yaitu terkait keamanan individu warga ASEAN. Dari sumber [statista.com](https://www.statista.com), jumlah warga negara ASEAN di Taiwan mencapai 735.387 orang (2022).¹

Nomor	Negara	Jumlah
1	Indonesia	243.795
2	Vietnam	239.580
3	Filipina	153.278
4	Thailand	73.052
5	Malaysia	23.854
6	Singapura	1.828

Merujuk perincian di tabel, kemungkinan besar warga Indonesia jumlahnya lebih dari data [statista](https://www.statista.com) tersebut. Pasalnya, saat terjadi gempa di Taiwan bulan April 2024,

Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat, jumlah WNI di Taiwan mencapai 284.751 orang. Angka ini juga tidak termasuk TKI Ilegal Indonesia yang berada di Taiwan yang jumlahnya menurut Departemen Pekerja Migran Democratic Progressive Party berjumlah sekitar 50.000 orang. Dengan demikian, bisa diperkirakan, total WNI di Taiwan bisa mencapai 335.000 orang. Sebangun dengan ekstrapolasi tersebut, jumlah warga negara ASEAN bisa mencapai 800.000 orang di Taiwan.

Politik Domestik dan Ancaman Eksternal

ISDS mengadakan pertemuan dengan berbagai think-tank pada 9 – 13 Juli 2024, yaitu Institute of International Relation NCCU, Taiwan Foundation of Democracy, Institute for National Defense and Security Research, dan Prospect Foundation. Selain itu, ISDS juga berdiskusi dengan tiga partai yang ada di pemerintah dan parlemen yaitu Democratic Progressive Party (DPP), Kuomintang Chinese Nationalist Party, dan Taiwan People's Party.

Dari berbagai pembicaraan, disimpulkan bahwa bagi masyarakat Taiwan, bergabung dalam satu sistem Republik Rakyat Tiongkok mendapat penolakan yang absolut. Survei resmi pemerintah Taiwan tahun 2020 menjelaskan pendapat masyarakat Taiwan ini secara rinci.² Penyebab penolakan tersebut terutama karena masyarakat Taiwan merasa nyaman dengan demokrasi. Mereka juga melihat perlakuan China terhadap Hongkong sebagai contoh buruk. Penolakan ini semakin kuat terasa pada generasi muda Taiwan yang lahir di masa demokrasi dan tidak memiliki ikatan historis atau emosional dengan Republik Rakyat Tiongkok.³

Sentimen publik ini sampai derajat tertentu menimbulkan friksi di dalam parlemen. Situasi politik domestik di Taiwan cukup dinamis. Pada Januari 2024, Taiwan menggelar pemilu Presiden dan legislatif. Hasilnya, Presiden dimenangkan oleh Lai Ching-te dari DPP dengan 40.05 % suara. Di legislatif, pemenangnya adalah partai Kuomintang (52 kursi), DPP (51 kursi), dan TPP (8 kursi) dan independent 2 kursi. DPP kehilangan mayoritas di DPP yang telah dipegangnya sejak 2016.

Keseimbangan proporsi antara legislatif dan eksekutif itu menjadi salah satu faktor sulitnya kompromi. Khusus tentang sikap Taiwan terhadap Cina, dari diskusi antara ISDS dan tiga partai legislatif tersebut ada persamaan bahwa tidak ada satupun partai ingin Taiwan kembali bergabung dengan Cina. Akan tetapi, ada perbedaan mencolok antara DPP dan Kuomintang. DPP yang banyak berbasis anak muda, menarik garis batas yang jelas dengan pemerintahan Beijing. Komunikasi sangat minim. Hingga awal Juli 2024, belum ada pertemuan resmi antara DPP dan Partai Komunis China atau antara dua pemimpin negara. Di sisi lain, Kuomintang yang banyak didukung orang-orang tua, membangun komunikasi intensif dengan China. Masalahnya, kedua partai ini terlihat tidak bekerja sama dalam isu ini bahkan ada saling tuding dan ketidakpercayaan.

Dari think-tank pertahanan, walaupun tidak melihat akan ada serangan invasi China secara fisik ke daratan Taiwan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, tetap

melihat China sebagai ancaman. China saat ini dianggap tengah melancarkan perang informasi untuk meyakinkan warga Taiwan tentang nikmatnya integrasi dengan China dan perang hukum untuk menyerang pihak-pihak yang kontra di Taiwan. Perang psikologis dalam bentuk latihan militer juga kerap dilancarkan China.

Taiwan melancarkan dua strategi secara eksternal. Pertama, untuk mengurangi independensi terhadap China, Taiwan sejak 2016 membuat New Southbound Policy yaitu untuk meningkatkan kerja sama dengan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Australasia. Kedua, Taiwan tidak akan pernah melakukan aksi provokatif terhadap China. Strategi militer yang disiapkan adalah bertahan, terutama dalam menghadapi ancaman peperangan elektronik China yang diperkirakan akan diluncurkan terlebih dahulu. Harapannya, setelah kurang dari 72 jam, bantuan militer AS akan masuk ke Taiwan untuk melawan China.

Pilihan strategi ini tampaknya yang paling mungkin diambil Taiwan, walaupun tentunya ada sisi resikonya. Pertama, AS tentunya memiliki kepentingan nasionalnya. Kedua, secara taktis dan teknis bantuan AS ini tentunya juga tidak mudah dilaksanakan, termasuk adanya kebijakan politik yang berubah-ubah seiring dengan pergantian presidennya.

ASEAN

Meletakkan ASEAN dalam konteks ini menjadi sulit karena perbedaan latar belakang, politik domestic, politik luar negeri dan hubungan dengan China selama ini. Ada negara seperti Filipina yang selama ini kerap berkonflik dengan China. Kamboja, Birma dan Laos yang selama ini pro China diperkirakan akan konsisten. Sementara ada negara-negara yang berusaha untuk netral atau menyeimbangkan posisinya dengan derajat tertentu terhadap China dan AS seperti Singapura, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan mengambil sikap sesuai situasi.

Bagaimana pemihakan masing-masing negara di Asia Tenggara terhadap China atau AS dalam konteks pecahnya konflik di Taiwan tergantung banyak faktor. Misalnya, bagaimana konflik itu pecah dan siapa yang memulainya akan menentukan bagaimana sentiment negara-negara lain kalau konflik pecah di Taiwan. Namun, di atas segalanya, pihak mana yang memastikan keselamatan warga negara-negara ASEAN, terutama yang disebutkan di atas yang akan mendapatkan dukungan.⁴

Bagi negara-negara ASEAN seperti Indonesia, tidak mungkin evakuasi dilakukan masing-masing. Harus ada kerja sama baik antara negara ASEAN, maupun negara-negara lain.

Secara teknis pengiriman alat transportasi untuk mengangkut Warga Negara Indonesia dari Taiwan cukup sulit. Pertama, jumlahnya sangat banyak. Kedua, secara lokasi jauh. Ketiga, di masa awal perang baik Taiwan maupun China akan menutup akses komunikasi dan transportasi. Keempat, kalau konflik berkembang dengan cepat, maka secara taktis dan teknis evakuasi di tengah perang sangat sulit dilakukan.

Kesimpulan dan Saran

1. Diplomasi Indonesia di ASEAN perlu ditingkatkan. Yang utama adalah menjalin hubungan baik dengan Taiwan dan Cina dan berupaya menjaga perdamaian di kawasan. Hal ini sebenarnya tidak sulit mengingat, siapapun yang mulai memecahkan konflik menjadi perang kinetik akan mendapat posisi rendah di dalam geopolitik kawasan. Baik Taiwan dan Cina pada saat ini menjaga status quo agar tidak pecah konflik karena sama-sama memiliki kepentingan ekonomi terkait jalur rantai pasok global.
2. Diplomasi Indonesia bisa ditingkatkan dengan menjadi agen perdamaian antara China dan Taiwan. Ada berbagai tingkatan perdamaian antara China dan Taiwan, namun membuka komunikasi antara partai pemenang pemilu Taiwan dan Partai Komunis China akan menurunkan tegangan dan resiko salah mengerti di kawasan tersebut.
3. Diplomasi Indonesia dengan sesama negara ASEAN dan negara-negara kawasan seperti Taiwan, China, AS, Jepang, untuk membahas rencana darurat evakuasi. ASEAN telah memiliki "[Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member Countries in Crisis Situations](#)," tentang tolong menolong antara negara ASEAN selama krisis.
4. Hubungan ekonomi dengan Taiwan perlu ditingkatkan terutama terkait industri komponen yang menjadi keunggulan Taiwan tapi kekurangan besar Indonesia.

Daftar Pustaka

1. -, "Number of foreign residents living in Taiwan in 2023, by place of origin", statista.com, <https://www.statista.com/statistics/1321539/taiwan-number-of-foreign-residents-by-place-of-origin/>, accessed Aug 1st, 2024.
2. -, "Public Perception that Chinese Authorities are Unfriendly to Taiwan Reaches New High; Over 90% Surveyed Oppose the CCP's "One Country, Two Systems" and its Suppression of Taiwan through Military and Diplomatic Means", Mainland Affairs Council Republik of Taiwan. March 26th, 2020. https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=A921DFB2651FF92F&sms=37838322A6DA5E79&s=4C12F840F128DD2E, accessed Aug 1st, 2024
3. Huang, Christine. "Most people in Taiwan see themselves as primarily Taiwanese; few say they're primarily Chinese", PEW Research, January 16th 2024, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/01/16/most-people-in-taiwan-see-themselves-as-primarily-taiwanese-few-say-theyre-primarily-chinese/>, accessed Aug 2nd, 2024.
4. Bing, Ngeow Chow, "How Southeast Asia Might React in a Potential Military Conflict Over Taiwan", Carnegie Endowment, <https://carnegieendowment.org/research/2024/06/how-southeast-asia-might-react-in-a-potential-military-conflict-over-taiwan?lang=en¢er=china>, June 17th 2024, accessed Aug 2nd 2024.

